

EVALUASI PROGRAM NAGARI TANGGUH BENCANA DI NAGARI AMPIANG
PARAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Meta Melani Fernandes

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Metamelani1999@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program nagari tangguh bencana, mengevaluasi atau menilai program tersebut apakah berjalan secara optimal dan apakah program tersebut layak untuk terus dijalankan. Program nagari tangguh bencana bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dan upaya penyelamatan diri secara mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, panduan wawancara berupa butiran-butiran pertanyaan yang telah disiapkan, alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah kamera, HP, dan alat rekaman. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program nagari tangguh bencana yang dijalankan di nagari ampiang parak belum berjalan secara optimal dan tujuan dari program tersebut belum tercapai secara keseluruhan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Nagari Tangguh Bencana

A. PENDAHULUAN

Secara Geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada, 0059'-2028,6' lintang selatan dan 100019'-101018' Bujur Timur yang membujur dari Utara keselatan dengan panjang garis pantai 287,2 km, tinggi dari permukaan laut 0-1000 meter, mempunyai luas 5.749,89 Km², luas perairan laut 84.312 km². Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) memetakan sebelas dari 15 kecamatan di kabupaten tersebut yang berada di daerah rawan tsunami dengan jarak dua sampai empat kilometer dari garis pantai. dari 15 kecamatan tersebut hanya empat kecamatan yang bebas dari ancaman tsunami, sebelas berada di sepanjang garis pantai dan rawan tsunami. Selain rawan tsunami, Pesisir Selatan juga rentan terhadap Bencana-Bencana Alam lain nya seperti Longsor, Banjir, Abrasi Pantai dan sebagainya. Sudibyakto (2011:1), menjelaskan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Nagari Ampiang Parak termasuk salah satu Nagari yang berada di zona merah atau rentan terhadap bencana karena keberadaan Nagari Ampiang Parak yang sangat dekat dengan pantai, selain itu jarak evakuasi bencana juga lumayan jauh dari pemukiman warga, itu lah sebabnya masyarakat setempat di tuntut untuk bisa mandiri dalam menyelamatkan diri jika suatu saat terjadi bencana, masyarakat harus lebih cerdas dan paham dengan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana. Untuk mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi jika suatu saat bencana datang maka pemerintah harus membentuk program Pengurangan Resiko Bencana berbasis masyarakat. Jonatan Lassa (dalam Ichwan Muis,2018) menjelaskan pengertian Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas untuk mengelola bencana di tingkat lokal.

Program Nagari Tangguh Bencana merupakan suatu program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana seperti melakukan sosialisasi bagaimana cara menyelamatkan diri jika suatu saat terjadi bencana, atau mitigasi bencana sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri dan dapat meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan oleh bencana seperti Tsunami, abrasi pantai dan lainnya. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama (Arikunto, 2009). Menurut penulis program merupakan suatu pelaksanaan dari

sebuah kebijakan yang melibatkan banyak orang dan program membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pelaksanaannya.

Aturan yang melandasi Program Nagari Tangguh Bencana merujuk kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana. Desa/nagari Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi masyarakat. (Dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana). Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah: Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana, Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB, Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Untuk mengetahui suatu program apakah berjalan dengan baik atau tidak maka perlu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap program tersebut, jika program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan maka program tersebut bisa terus di lanjutkan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh orang yang berhak dalam pengambilan keputusan. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program. Evaluasi berguna dalam membimbing pengelolaan, pengumpulan data dan analisis (Lukum 2015). Menurut penulis evaluasi program adalah rangkaian informasi atau penilaian terhadap suatu program yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan publik. Dalam melakukan evaluasi terhadap program pengurangan resiko bencana penulis menggunakan model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, dkk. CIPP memiliki empat indikator yaitu *Context evaluation*: evaluasi terhadap konteks, *Input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *Process evaluation* : evaluasi terhadap proses, *Product evaluation* : evaluasi terhadap produk.

Dalam penerapan suatu program memang memerlukan kesiapan yang matang baik dari segi anggaran, fasilitas, sumber daya manusia dan

pelaksanaan program itu sendiri, penerapan suatu program tentu juga memiliki kekurangan atau pun hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kekurangan dari program nagari tangguh bencana di nagari ampiang parak adalah kurangnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten untuk pelaksanaan program tersebut, akibat dari kurangnya anggaran maka program tersebut tidak berjalan lagi di BPBD, program tersebut hanya dijalankan oleh pihak nagari dengan menggunakan dana desa, meskipun sudah menggunakan dana desa namun anggaran untuk program nagari tangguh bencana ini masih terbatas, selain anggaran di nagari ampiang parak juga mempunyai fasilitas yang terbatas, keterbatasan fasilitas ini juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program nagari tangguh bencana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Basrowi (2008:21), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam Basrowi (2008:21), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari banyak sumber, sehingga teknik yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

C. Hasil Dan Pembahasan

Evaluasi Program Nagari Tangguh Bencana Di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan (menggunakan indikator evaluasi program CIPP yang dikemukakan oleh stuflebeam).

Berdasarkan indikator evaluasi program penulis yaitu CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stuflebeam maka secara **context** di Nagari Ampiang Parak yaitu perumusan tujuan yang hendak dicapai dalam program tersebut. Tujuan dari program itu sendiri adalah untuk memberi pemahaman bagi masyarakat agar mengerti dan siap dalam menghadapi suatu

bencana yang akan terjadi di Nagari Ampiang Parak, masyarakat diminta untuk tanggap dalam melakukan evakuasi mandiri, dan meminimalisir dampak dari resiko bencana tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan, Nagari ampiang parak harus memiliki strategi agar program bisa berjalan secara optimal dan mencapai tujuan dengan baik, Secara *Context* hal ini sudah terpenuhi karena dalam membuat Program di rumuskan tujuan dari program terlebih dahulu, sehingga program Nagari tangguh bencana di Nagari Ampiang Parak lebih terarah karena telah memiliki tujuan yang hendak dicapai, selain itu Program nagari tangguh bencana di Nagari Ampiang parak juga sudah memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Nagari Ampiang Parak No 02 Tahun 2019 Tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Nagari.

Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan tentang Penerapan Program Nagari Tangguh Bencana ini. Pertama, masalah dana atau anggaran untuk program nagari tangguh bencana, permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu program, karena menjalankan program tersebut membutuhkan dana khusus dengan jumlah dana yang cukup besar. Kedua, selain anggaran, Sumber Daya Manusia juga berperan penting dalam menjalankan Program Pengurangan Resiko Bencana. di Nagari Ampiang Parak sumber daya manusia sudah mencukupi dalam menjalankan program nagari tangguh bencana. Ketiga yaitu, kurangnya pelatihan yang di berikan BPBD kabupaten pesisir selatan tentang Pengurangan Resiko Bencana. seharusnya pemerintah kabupaten harus ikut serta memberikan pelatihan terhadap program nagari tangguh bencana, akan tetapi BPBD tidak memiliki anggaran untuk melakukan program tersebut sehingga program tersebut tidak lagi berjalan di BPBD. Keempat yaitu tingkat partisipasi dari sebagian masyarakat yang masih tergolong rendah terhadap program pengurangan resiko bencana, masih ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai program pengurangan resiko bencana dikarenakan tidak pernah ikut serta dalam sosialisasi mengenai program tersebut dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam program pengurangan resiko bencana karena terhalang oleh pekerjaan yang mayoritasnya sebagai nelayan.

Secara *input* di Nagari Ampiang Parak ini mengarah kepada strategi yang dilakukan Nagari Ampiang Parak untuk mencapai program tersebut. strategi yang digunakan yaitu pemanfaatan lokasi ekowisata sebagai pengurangan resiko bencana, Hal ini sudah hampir terpenuhi dengan adanya penanaman pohon mangrove di sepanjang pantai Ampiang Parak. Selain itu strategi yg digunakan yaitu melakukan pelatihan kepada masyarakat agar paham terhadap pengurangan resiko bencana. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yendri sebagai sekretaris nagari yang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pengurangan resiko bencana sudah hampir terpenuhi namun pelatihan yang dilakukan dari pihak BPBD masih kurang, seharusnya

dalam melaksanakan program ini membutuhkan kerja sama antar lembaga yang bergerak dalam bidang kebencanaan, hal ini juga diakui oleh Kabid PK BPBD kabupaten pesisir selatan yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelatihan yang diberikan BPBD terhadap program nagari tangguh bencana karena keterbatasan anggaran, meskipun begitu, pihak Nagari tetap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Pengurangan Resiko Bencana meskipun Pengetahuan atau SDM di Nagari Ampiang Parak masih terbatas, dan sesekali pihak Nagari mengundang narasumber dari lembaga yang bergerak dalam bidang kebencanaan agar bisa membagi ilmu kepada masyarakat Nagari Ampiang Parak.

Selanjutnya **process** dalam hal ini berkaitan dengan proses yang akan dilakukan dalam menjalankan program pengurangan resiko bencana, seperti penggunaan fasilitas, pendanaan dan sumber daya manusia. Untuk menunjang keberhasilan suatu program juga diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap, jika sarana dan prasarana tidak memadai maka itu akan menghambat jalannya program tersebut, Di Nagari Ampiang Parak, selain jarak evakuasi yang jauh dari pemukiman masyarakat, fasilitas dalam menjalankan program pengurangan resiko bencana juga tidak memadai, karena tidak ada fasilitas yang diberikan BPBD. Terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Yendri, dapat disimpulkan yaitu ampiang parak sudah memiliki beberapa fasilitas seperti tenda dan alat mitigasi bencana, namun fasilitas tersebut belum lengkap, selain fasilitas yang terbatas kurangnya pelatihan terhadap penggunaan fasilitas tersebut juga menghambat jalannya program nagari tangguh bencana, karena sumber daya manusia di nagari ampiang parak termasuk rendah sehingga memerlukan pelatihan dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang kebencanaan, namun dari pihak BPBD masih kurang dalam pemberian pelatihan terhadap masyarakat di nagari ampiang parak, adapun pelatihan yang dilakukan itu merupakan undangan dari pihak nagari dengan menggunakan dana desa, jadi untuk pelaksanaan program pengurangan resiko bencana di nagari ampiang parak tidak mendapatkan dana khusus dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. hal ini diakui oleh kabid PK BPBD Bapak Yef Indra yang dapat disimpulkan bahwa program pengurangan resiko bencana di nagari ampiang parak memang tidak berjalan lagi di BPBD sehingga tidak ada pelatihan ataupun fasilitas yang di berikan pihak BPBD di karenakan anggaran yang terbatas, sehingga program hanya berjalan di Nagari Ampiang parak dengan menggunakan dana desa dan fasilitas yang dimiliki Nagari.

Evaluasi selanjutnya yaitu **product** hal ini mengarah pada hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pengurangan resiko bencana. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Irwan Desrinaldi sebagai Ketua KSB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengurangan resiko bencana

sudah mencapai 70% sampai 80%. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam program pengurangan resiko bencana, karena program ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari resiko bencana yang akan terjadi sehingga masyarakat sudah siap secara pengetahuan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat sudah paham tentang program pengurangan resiko bencana namun sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya mengetahui tentang program tersebut, partisipasi sebagian masyarakat masih kurang, selain terkendala oleh pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai pengurangan resiko bencana ada juga masyarakat yang memang tidak peduli dengan program tersebut. Sekretaris Nagari Ampiang Parak Bapak Yendri yang dapat disimpulkan bahwa ada 3 kelompok masyarakat berdasarkan keikutsertaan dalam program pengurangan resiko bencana, yang pertama ada masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana karena mendapatkan pelatihan dan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana, yang kedua ada masyarakat yang enggan untuk mengikuti pelatihan pengurangan resiko bencana terkait dengan kepercayaan, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang tidak mau tau sedikit pun tentang program dan pelatihan pengurangan resiko bencana.

Temuan diatas tidak sesuai dengan indikator teori evaluasi program yang dikemukakan oleh Stufflebeam yang mengatakan indikator evaluasi program adalah CIPP (*context, Input, Process, Product*). Seperti dalam proses berjalannya program tidak memiliki dana khusus, pelatihan dan fasilitas yang diberikan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, karena anggaran yang terbatas mengakibatkan program tersebut tidak lagi berjalan di BPBD, Selain itu product atau hasil dari program pengurangan resiko bencana belum tercapai secara menyeluruh. Masyarakat masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai pengurangan resiko bencana dikarenakan partisipasi masyarakat yang masih rendah.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pengurangan resiko bencana di Nagari Ampiang Parak belum berjalan secara optimal, karena kurangnya pelatihan yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat tentang pengurangan resiko bencana, sedangkan dari pihak nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dengan SDM yang terbatas. Karena SDM di Nagari Ampiang Parak masih minim dalam menjalankan pelatihan terhadap masyarakat maka pelatihan jarang dilakukan, adapun pelatihan yang dilakukan sangat jarang dan pihak nagari juga harus

mengundang narasumber dari BPBD atau orang yang ahli dalam bidang kebencanaan. keterbatasan anggaran juga mengakibatkan program tidak terlaksana karena untuk menjalankan program membutuhkan biaya yang besar termasuk dana yang harus dikeluarkan untuk membayar narasumber yang di undang untuk menjalankan program tersebut.

Sebaiknya anggaran untuk program Nagari tangguh bencana ini lebih diperhatikan dan dipenuhi, dan pihak BPBD ataupun lembaga yang bergerak dalam bidang kebencanaan harus lebih giat lagi melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang pengurangan resiko bencana, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mengerti tentang pengurangan resiko bencana, program ini sangat membantu pengetahuan masyarakat sehingga mereka bisa melakukan evakuasi mandiri sehingga bisa mengurangi dampak dari resiko bencana, selain itu fasilitas pun hendaknya harus dilengkapi agar program bisa berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, Dkk. 2009. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara
- Basrowi, Dkk. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Ichwan Muis, Dkk. 2018. Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Asian Social Work Journal. Volume 3, Issue 4, September 2018 e-ISSN : 0128-1577.
- Lukum Astin .2015. Evaluasi Program Pembelajaran Ipa Smp Menggunakan Model Countenance Stake. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan volume 19, No 1, (25-37)
- Moleong Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana
- Peraturan Nagari Ampiang Parak No 02 Tahun 2019 Tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Nagari.
- Sudibyakto. 2011. Manajemen Bencana Di Indonesia Ke Mana. Yogyakarta: Gajah Mada University PRESS